

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Aryadi, Gregorius, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atmajaya : Yogyakarta.
- David O. Sears, Et.All, 1994, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Erlangga.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Handoyo, Ida Listyarini, 2004, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Bandung : PT. Pakar Raya.
- Hawari, H. Dadang, 2000, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (NARKOTIKA, ALKOHOL & ZAT ADIKTIF)*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Kaligis, O.C., 2002, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Bandung : PT. Alumni.
- L, Dwi Yanny, 2001, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sukardi, I Ketut Dewa, 1973, *Bimbingan Karier Di Sekolah-Sekolah*, Jakarta : Ghalia.

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, 2003, Jakarta : Sinar Grafika.

Walgito, Bimo, 1990, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta : Andi Offset.

Wirawan, Sarlito, 1987, *Psikologi Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali.

Yudowidagdo, Hendrastanto, Et. All, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang

Pengesahan Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman.